

REKONSTRUKSI FANSUR DAN LATAR INTELEKTUAL HAMZAH FANSURI DALAM EKONOMI POLITIK KESULTANAN-KESULTANAN ACEH

Miswari

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

Correspondence: miswari@iainlangsa.ac.id

Abstract

For over a century, the historiography of Hamzah Fansuri has rested on the assumption that Fansur is identical to Barus on the west coast of Sumatra, a premise widely accepted yet never tested through a multidisciplinary approach, leaving uncertainty about the geographical and intellectual background of his thought. This article aims to reconstruct the geographical identity of Fansur and to explain Hamzah Fansuri's intellectual background within the genealogical political economy of the Acehnese sultanates, from Peureulak and Samudra Pasai to Aceh Darussalam. The study employs the historical method with a critical historiographical approach, drawing on comparative analysis of primary and secondary sources, including manuscripts, inscriptions, archaeological reports, and historiographical literature on Aceh and Malay maritime trade networks. The findings indicate that the identification of Fansur with Barus remains historically problematic, whereas Ujong Pancu on the coast of Aceh Besar is more consistent with the commercial and political center dominated by merchant oligarchy. The study further reveals that the advancement of Peureulak, Samudra Pasai, and Aceh Darussalam cannot be understood solely through the lens of Islamization, but must be situated within a sustained maritime political-economic framework. It is thus concluded that Hamzah Fansuri's thought developed within a cosmopolitan port environment that brought together trade networks, political authority, and the Islamic intellectual tradition of the Malay world.

Keywords: Hamzah Fansuri; Fansur; Ujong Pancu; Acehnese Sultanates; Merchant Oligarchy

Abstrak

Selama lebih dari satu abad, historiografi Hamzah Fansuri dibangun di atas asumsi bahwa Fansur identik dengan Barus di pesisir barat Sumatra, sebuah premis yang diterima luas namun belum pernah diuji melalui pendekatan multidisipliner, sehingga menyisakan ketidakpastian mengenai latar geografis dan intelektual pemikirannya. Artikel ini bertujuan merekonstruksi identitas geografis Fansur serta menjelaskan latar intelektual Hamzah Fansuri dalam kerangka genealogi ekonomi-politik kesultanan-kesultanan Aceh, mulai dari Peureulak dan Samudra Pasai hingga Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historiografi kritis melalui studi pustaka dan analisis komparatif terhadap sumber primer dan sekunder, mencakup

manuskrip, inskripsi, laporan arkeologis, dan literatur historiografi Aceh serta jaringan perdagangan Alam Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi Fansur dengan Barus masih menyisakan persoalan historis, sedangkan kawasan Ujong Pancu di pesisir Aceh Besar lebih konsisten dengan pusat perdagangan dan kekuasaan yang didominasi oligarki dagang. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kemajuan Peureulak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam tidak dapat dipahami semata-mata melalui perspektif islamisasi, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka ekonomi-politik maritim yang berkesinambungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hamzah Fansuri berkembang dalam lingkungan pelabuhan kosmopolitan yang mempertemukan jaringan perdagangan, kekuasaan politik, dan tradisi intelektual Islam Alam Melayu.

Kata Kunci: Hamzah Fansuri; Fansur; Ujong Pancu; Kesultanan Aceh; Oligarki Dagang

PENDAHULUAN

Selama lebih dari satu abad, historiografi Hamzah Fansuri dibangun di atas asumsi yang hampir tidak pernah dipersoalkan, yakni bahwa Fansur identik dengan Barus di pesisir barat Sumatra (Drewes & Brakel, 1986). Premis tersebut diterima secara luas dan kemudian menjadi landasan bagi rekonstruksi biografi Hamzah Fansuri, jaringan intelektualnya, pola mobilitasnya di Alam Melayu, bahkan konteks sosial dan kultural yang dianggap membentuk corak pemikiran tasawufnya. Akibatnya, identifikasi geografis Fansur berkembang dari sekadar hipotesis filologis menjadi paradigma historiografis yang direproduksi dalam berbagai kajian berikutnya tanpa evaluasi metodologis yang memadai. Padahal, hingga kini identifikasi tersebut belum pernah diuji melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan bukti filologis, epigrafis, geografi historis, arkeologi maritim, serta sejarah ekonomi-politik Alam Melayu. Ketidadaan sintesis antardisiplin ini tidak hanya menyisakan ketidakpastian mengenai identitas geografis Fansur, tetapi juga berimplikasi pada cara para sarjana memahami lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk dunia intelektual Hamzah Fansuri. Dengan demikian, persoalan mengenai lokasi Fansur sesungguhnya bukan sekadar perdebatan toponimi, melainkan menyangkut validitas kerangka historiografi yang selama ini digunakan untuk menjelaskan relasi antara ruang maritim, jaringan perdagangan, dan lahirnya tradisi intelektual Islam di Kesultanan Aceh Darussalam.

Kajian mengenai Hamzah Fansuri selama beberapa dekade didominasi oleh tiga kecenderungan utama. *Pertama*, penelitian filologis dan intelektual yang berfokus pada pemikiran tasawuf, karya-karya sastra, dan jaringan intelektualnya (Guillot & Kalus, 2008). *Kedua*, perdebatan historiografis mengenai asal-usul Hamzah Fansuri yang terutama berkisar pada identifikasi Fansur sebagai Barus atau lokasi lain (Al-Attas, 1967). *Ketiga*, kajian sejarah perdagangan dan politik Kesultanan Aceh yang membahas perkembangan pelabuhan, perdagangan internasional, dan elite ekonomi seperti Orang Kaya yakni para pengusaha penguasa perdagangan yang disebut merchant oligarchy (oligarki) sebagai aktor penting dalam struktur kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam (Lombard, 2014). Meskipun ketiga tradisi kajian tersebut berkembang cukup luas, masing-masing masih berjalan secara terpisah dan belum menghasilkan suatu kerangka analisis yang menghubungkan biografi intelektual Hamzah Fansuri dengan struktur ekonomi-politik Kesultanan Aceh.

Artikel ini berargumen bahwa identifikasi Fansur sebagai Barus telah menghasilkan pembacaan yang keliru terhadap biografi intelektual Hamzah Fansuri. Melalui rekonstruksi historiografi, geografi maritim, data epigrafi, dan sejarah perdagangan, artikel ini menunjukkan bahwa Fansur lebih tepat diidentifikasi sebagai kawasan Ujong Pancu, Peukan Bada di pesisir Aceh Besar. Rekonstruksi tersebut menjelaskan mengapa Hamzah Fansuri memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika politik, ekonomi, dan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, karena ia hidup di pusat jaringan perdagangan internasional yang dikendalikan oleh oligarki dagang (merchant oligarchy, Orang Kaya), yakni kelompok yang secara *de facto* menentukan legitimasi dan pergantian sultan sebelum maupun sesudah pemerintahan Iskandar Muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historiografi kritis untuk merekonstruksi identifikasi geografis Fansur dan menganalisis implikasinya terhadap latar ekonomi-politik serta lingkungan

intelektual Hamzah Fansuri. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber sekunder, meliputi kajian manuskrip, karya sastra Hamzah Fansuri, laporan inskripsi batu nisan, laporan arkeologi, serta literatur historiografi mengenai Aceh, Barus, dan jaringan perdagangan Alam Melayu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah publikasi ilmiah, hasil penelitian arkeologis, dan sumber epigrafis yang relevan. Analisis data menggunakan metode kritik sejarah yang mencakup kritik eksternal untuk menguji autentisitas sumber dan kritik internal untuk menilai kredibilitas informasi, kemudian diinterpretasikan secara komparatif melalui pendekatan filologis, arkeologis, epigrafis, dan historis. Pendekatan multidisipliner tersebut digunakan untuk mengevaluasi kembali identifikasi Fansur dengan Barus serta merekonstruksi kemungkinan Fansur sebagai kawasan Ujong Pancu, Peukan Bada, Aceh Besar berdasarkan konsistensi bukti tekstual, material, dan geografis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Historiografis Identifikasi Fansur

Tidak sedikit sarjana yang menganggap bahwa lakab “Fansur” sebagai nama belakang Hamzah Fansuri merujuk pada sebuah tempat yang bernama Barus di Sumatera Utara. A. H. Johns merupakan salah satu sarjana awal yang mengukuhkan identifikasi Fansur dengan Barus dalam historiografi modern Hamzah Fansuri. Berangkat dari penggunaan nisbah *al-Fansuri*, Johns menerima bahwa sebutan tersebut merujuk pada Barus, pelabuhan penghasil kapur barus yang sejak abad pertengahan dikenal dalam jaringan perdagangan (John, 1990). Namun, ia tidak menjadikan identitas geografis Fansur sebagai objek kajian tersendiri, melainkan menerimanya sebagai asumsi historiografis yang telah mapan ketika merekonstruksi perkembangan tasawuf Alam Melayu. Akibatnya, identifikasi Fansur sebagai Barus direproduksi sebagai premis yang tidak lagi dipersoalkan, sehingga membentuk narasi tentang asal-usul Hamzah Fansuri tanpa verifikasi komprehensif. Padahal bila dicermati secara sederhana saja, penyebutan kata “Fansur” dengan “Barus” tidak memiliki kemiripan dan tanpa hubungan sama sekali.

Apalagi dengan adanya temuan sebuah makan di Barus yang menerangkan bahwa ulama tersebut berasal dari Fansur. Mustahil bila seseorang dimakamkan di satu tempat akan menjelaskan asalnya di tempat itu sendiri.

Vladimir Braginsky pada dasarnya menerima identifikasi Fansur dengan Barus sebagaimana telah berkembang dalam tradisi historiografi sebelumnya. Nisbah *al-Fansuri* dipahami sebagai rujukan geografis kepada Barus, pelabuhan tua di pesisir barat Sumatra yang sejak abad pertengahan dikenal luas sebagai pusat perdagangan kapur barus (Braginsky, 1999). Dengan menerima identifikasi tersebut, Braginsky menempatkan Hamzah Fansuri dalam lingkungan budaya dan perdagangan Barus sebagai bagian dari konteks historis kemunculan tradisi intelektual Melayu-Islam. Padahal berbagai narasi dalam puisi-puisi Hamzah Fansuri, khususnya menyinggung tentang kekuasaan politik, sepenuhnya merujuk pada Kesultanan Aceh darussalam yang mana pada masa itu, Barus tidak berada dalam posisi sebagai sentral maritim dan belum diakuakuisisi oleh Kesultanan Aceh Darussalam.

Claude Guillot dan Ludvik Kalus menerima identifikasi Fansur dengan Barus dan berupaya memperkuatnya melalui pendekatan arkeologis serta epigrafis. Berbeda dengan sarjana sebelumnya yang mendasarkan argumentasi pada bukti filologis, keduanya menempatkan Barus sebagai referensi geografis bagi nisbah *al-Fansuri* berdasarkan temuan-temuan arkeologi dan inskripsi Islam yang berkaitan dengan kawasan tersebut. Dalam kajian mereka di *Archipel*, identifikasi ini diperkuat melalui analisis inskripsi batu nisan Shaykh Hamzah ibn ‘Abd Allāh al-Fansūrī di pemakaman Bāb al-Ma‘lā, Makkah, yang mereka tafsirkan bertarikh sekitar 1527 M. Atas dasar keterkaitan nisbah *al-Fansuri* dengan Barus, Guillot dan Kalus mengajukan hipotesis bahwa tokoh yang dimakamkan kemungkinan merupakan Hamzah Fansuri (Guillot & Kalus, 2000). Dalam hal ini, mereka tidak hanya mempertahankan paradigma historiografis yang mengidentifikasi Fansur sebagai Barus, tetapi juga berupaya memberikan landasan material melalui bukti arkeologis dan epigrafis untuk memperkuat identifikasi tersebut. Padahal dalam

puisi-puisi Hamzah Fansuri menunjukkan bahwa ia mengembangkan karir intelektualnya tidak jauh dari pusat kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Rusmin Tumanggor merupakan salah satu sarjana Indonesia yang secara tegas menerima identifikasi Fansur dengan Barus, sejalan dengan arus utama historiografi yang telah dibangun oleh A. H. Johns, Drewes, Brakel, dan Braginsky. Bagi Tumanggor, Barus tidak hanya penting sebagai tempat asal Hamzah Fansuri, tetapi juga sebagai salah satu pintu awal masuknya Islam ke Nusantara melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Oleh karena itu, ia melihat keterkaitan antara identitas *al-Fansuri*, tradisi perdagangan maritim, dan perkembangan intelektual Islam Melayu sebagai satu kesatuan historis. Dalam penjelasannya, identifikasi Fansur dengan Barus diterima sebagai fakta historiografis yang relatif mapan (Tumanggor, 2019). Selanjutnya Tumanggor menerima bahwa untuk menunjukkan eksistensi Islam di Barus, pendekatan arkeologis tidak dapat menghasilkan fakta historis yang kuat. Dia menawarkan pendekatan filologis yang memberikan kemungkinan tentang eksistensi Islam lebih awal di Barus.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas sebelumnya telah menjelaskan bahwa hampir semua sarjana menerima begitu saja bahwa Fansur identik dengan Barus hanya karena nama "Fansuri". Menurutna, persoalan tersebut dianggap telah selesai, padahal sebenarnya belum pernah diuji kembali secara kritis. Oleh karena itu ia mengusulkan untuk membuka kembali persoalan tersebut melalui pembacaan ulang sumber-sumber primer. Kontribusi penting Syed Muhammad Naquib al-Attas terhadap studi Hamzah Fansuri tidak semata-mata terletak pada kesimpulannya mengenai asal-usul Hamzah Fansuri, melainkan pada pembaruan metodologi historiografi yang digunakannya. Al-Attas mengkritik kecenderungan para sarjana sebelumnya yang secara otomatis mengidentifikasi nisbah *al-Fansuri* sebagai penanda tempat kelahiran Hamzah. Bertolak dari tradisi penamaan dalam dunia Islam klasik, ia menunjukkan bahwa nisbah geografis tidak selalu merujuk pada tempat lahir, tetapi dapat menunjukkan asal-usul keluarga, tempat leluhur, pusat aktivitas, atau lokasi seseorang memperoleh reputasi intelektual. Atas dasar itu, istilah *asal* dan *tempat* dalam syair-syair Hamzah Fansuri tidak dapat dipahami

secara literal sebagai indikator kelahiran biologis, melainkan harus dibaca dalam kerangka semantik dan historis yang lebih luas. Pendekatan ini menjadi titik tolak penting bagi kritik terhadap konstruksi historiografi yang selama ini mengidentifikasi Fansur secara apriori dengan Barus (Al-Attas, 1967).

Pandangan Al-Attas mengenai kawasan mana yang menjadi nisbah kata “Fansur” dalam lakab nama Hamzah Fansuri perlu dimunculkan kembali mengingat pernyataan Abdul Hadi WM yang menjelaskan bahwa dalam salah satu bagian puisinya, Hamzah Fansuri menulis: *Berahimu daim kan orang kaya/ Manakan mendapat Yang Mulia Raya*. Penggalan puisi tersebut merupakan kritik atau peringatan dari Hamzah Fansuri tentang bagaimana para saudagar yang disebut Orang Kaya itu kerap menjadi junjungan masyarakat. Pada bagian-bagian lain puisinya, Hamzah Fansuri juga mengkritik tentang bagaimana banyak masyarakat yang terlena dengan hiruk pikuk kekuasaan politik dan kesibukan dalam kegiatan ekonomi. Abdul Hadi WM menjelaskan bahwa Hamzah Fansuri banyak mengkritik kekuasaan dan relasinya dengan kegiatan ekonomi-politik. Kritik politik ekonomi itu menurut Abdul Hadi WM menunjukkan bahwa Fansur sebagai tokoh yang mengembangkan karir intelektualnya pada lokasi yang tidak jauh dari pusat kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dan pusat perdagangan penting yang mampu menopang kekuatan ekonomi kesultanan itu. Dalam hal inilah, Barus yang dianggap sebagai Fansur menjadi kurang relevan karena kawasan itu terlalu jauh dari pusat kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Selain itu, masa pengembangan karier intelektual Hamzah Fansuri kurang relevan dengan Barus yang baru berkembang jauh setelah Sultan Iskandar Muda mangkat. Pada masa hidup Hamzah Fansuri yakni sebelum Iskandar Muda, Fansur telah mengalami kemajuan ekonomi perdagangan dan menjadi puncak kejayaan Orang Kaya yang mampu mengendalikan perpolitikan kesultanan.

Al-Attas menawarkan rekonstruksi kronologi kehidupannya melalui kritik filologis terhadap syair-syair yang memuji sultan yang oleh Al-Attas dinisbahkan pada Alauddin Riayat Syah (1588–1604). Berdasarkan analisis tersebut, Al-Attas berpendapat bahwa Hamzah Fansuri hidup sebelum dan selama pemerintahan

Alauddin Riayat Syah serta kemungkinan besar telah wafat sebelum Iskandar Muda naik takhta pada 1607 (Al-Attas, 1970). Pandangan Al-Attas perlu mendapatkan kritik yang mendalam. Hamzah fansuri tidak menyebut Alauddin Riayat Syah secara eksplisit melainkan hanya gelarnya saja. Gelar tersebut bisa saja dinisbahkan pada sultan yang hidup pada masa sebelumnya.

Shah Alam raja yang adil

Raja qutub sempurna kamil

Wali Allah sempurna wasil

Raja 'arif lagi mukammil

Abdul Hadi WM menjelaskan bahwa rentang waktu antara kehidupan Hamzah Fansuri dengan Sultan Iskandar Muda paling sedikit adalah seratus tahun. Pada masa kekuasaan Iskandar Muda (1607–1636 M), Syamsuddin Al-Sumatrani menjadi mufti kesultanan. Ajaran Wahdatul Wujud Al-Sumatrani telah jauh berbeda dengan Wahdatul Wujud yang diajarkan Hamzah Fansuri. Sehingga, seharusnya Hamzah Fansuri setidaknya telah mengembangkan karir intelektualnya pada 1507. Pendapat Abdul Hadi WM tersebut dikuatkan oleh para peneliti belakangan. Drewes dan Brakel berpendapat bahwa Hamzah Fansûrî telah wafat sebelum tahun 1590. Pendapat serupa dikemukakan oleh A. H. John, yang menyatakan bahwa Hamzah Fansûrî telah meninggal sebelum tahun 1600, bahkan kemungkinan sebelum tahun 1590. Kesimpangrsiuran tersebut mendapatkan kejelasannya melalui penelitian Claude Guillot dan Ludvik Kalus yang dipublikasikan dalam *Archipel*, Hamzah Fansuri diperkirakan telah wafat pada 1 April 1527. Pada masa sebagaimana ditegaskan Claude Guillot dan Ludvik Kalus tersebut, sultan Aceh Darussalam bukan Sultan Alauddin Riayat Syah sebagaimana dikemukakan Al-Attas, melainkan Sultan Ali Mughayat Syah (1514–1530). Pada masa tersebut, Kesultanan Aceh Darussalam belum menguasai Barus. Pula, kota itu belum berkembang dan memiliki hubungan dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Di samping itu, pujian atas Sultan Alauddin Riayat Syah sangat relevan karena sultan tersebut telah berhasil membebaskan Pasai dari Portugis. Secara personal, Hamzah Fansuri yang menimba ilmu di Pasai mengalami sendiri peristiwa penyerangan Portugis dan menyanjung kemuliaan

sultan yang telah memfasilitasi intelektual dan bangsawan Pasai di negeri negeri yang tidak jauh dari negeri yang tidak jauh dari pusat kekuasaan Aceh Darussalam yakni Fansur.

Hamzah Fansuri mengajukan kritik dan pengingat tentang situasi politik dan ekonomi pada Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Fansur adalah pusat perdagangan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa itu dan letaknya tidak jauh dari istana dan di sanalah Hamzah Fansuri. Mustahil Barus yang jauh itu menjadi tempat Hamzah Fansuri mengembangkan karirnya. Kajian arkeologis dan historiografis menunjukkan bahwa kawasan pesisir Aceh Besar, terutama bentang pantai dari Ujong Pancu hingga Alue Naga, merupakan salah satu simpul penting jaringan perdagangan maritim di Samudra Hindia. Dalam berbagai sumber Arab dan Persia, kawasan perdagangan di pantai utara Sumatra dikenal dengan sebutan “Fansur” atau “Fansuria”, Fansur yang merupakan Ujong Pancu di Kecamatan Peukan Bada sekarang ini telah mengalami abrasi. Sebelumnya teluk itu merupakan sebuah tanjung yang memiliki daratan luas hingga Ulue Naga, lokasi berlabuhnya kapal-kapal dari negeri yang jauh.

Fansur sebagai Pusat Pusat Perekonomian

Dalam tradisi lisan masyarakat Aceh masih dikenal istilah *Pancu*, yang oleh sebagian peneliti dipandang sebagai bentuk linguistik yang berkaitan dengan toponim *Fansur* dalam sumber-sumber Arab dan Persia. Berdasarkan interpretasi tersebut, kawasan Ujong Pancu dipahami sebagai bagian dari wilayah pesisir yang pada masa lampau berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan maritim di pantai utara Sumatra dan berlokasi tidak jauh dari pusat kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Meskipun identifikasi antara *Fansur* dan *Pancu* masih menjadi perdebatan dalam historiografi Alam Melayu, hipotesis ini memperoleh perhatian yang semakin besar seiring dengan berkembangnya penelitian arkeologi di kawasan pesisir Aceh Besar. Perhatian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian arkeologi dan epigrafi di Gampong Pande, Banda Aceh, yang berhasil mengungkap keberadaan sejumlah kompleks pemakaman Islam kuno beserta inskripsi-inskripsi batu nisan

yang memberikan informasi penting mengenai perkembangan masyarakat Muslim awal, jaringan perdagangan internasional, dan dinamika politik di pesisir utara Sumatra. Temuan-temuan tersebut memperkaya bukti material mengenai peranan kawasan Aceh dalam jaringan perdagangan Samudra Hindia sekaligus membuka perspektif baru terhadap proses islamisasi di Nusantara.

Signifikansi temuan ini juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar Internasional *Titik Nol Islam di Indonesia* yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Pascasarjana UMSU, Medan. Dalam forum tersebut, Ichwan Azhari memaparkan hasil kajian arkeologis dan epigrafis yang menunjukkan bahwa sejumlah nisan Islam dari Gampong Pande dan Samudra Pasai memiliki kronologi yang lebih tua dibandingkan sebagian besar nisan yang hingga kini ditemukan di Barus. Bukti arkeologis yang ditemukan di laut lepas tersebut membuktikan bahwa sebelumnya Fansur yang dimaksud adalah laut mulai dari Ujong Pancu hingga Gampong Pande bahkan Alue Naga dulunya adalah daratan, yang sebelumnya adalah tanjung namun telah menjadi teluk akibat abrasi perlahan dan diperparah oleh tsunami yang terjadi sekitar abad ke-18.

Ichwan Azhar berpendapat bahwa kajian komparatif terhadap bukti-bukti epigrafis memberikan dasar baru untuk meninjau kembali identifikasi historiografis antara Fansur dan Barus. Berdasarkan pembacaan terhadap inskripsi batu nisan yang telah dikaji para pakar epigrafi, menunjukkan bahwa pusat-pusat aktivitas Islam dan perdagangan di wilayah Aceh telah berkembang lebih awal dibandingkan bukti arkeologis yang sejauh ini ditemukan di Barus (Azhari, 2019). Dalam perspektif ini, identifikasi Fansur dengan Barus memerlukan peninjauan kembali. Perkembangan Barus sebagai sentra perdagangan baru terjadi sekitar abad ke-18, sementara Ujong Pancu telah dikenal luas sejak abad ke-12.

Hasil penelitian Claude Guillot dan timnya yang dipublikasikan dalam *Barus: Seribu Tahun yang Lalu* serta *Lobu Tua: Sejarah Awal Barus* menunjukkan dominasi artefak permukiman dan perdagangan. Sedangkan bukti epigrafis Islam yang ditemukan berasal dari periode yang relatif lebih kemudian. Temuan ini

menunjukkan bahwa bukti arkeologis yang tersedia belum cukup untuk menempatkan Barus sebagai pelabuhan kosmopolitan yang telah menjalin hubungan dagang dengan dunia Islam sejak masa-masa paling awal (Gullot, 2008). Sebaliknya, akumulasi temuan arkeologis di kawasan pesisir paling barat Aceh Besar, terutama Gampong Pande dan Alue Naga memperlihatkan indikasi yang lebih kuat mengenai keberadaan jaringan perdagangan internasional dan komunitas Muslim pada periode yang lebih awal.

Apabila bukti-bukti tersebut dibaca bersama keterangan geografis dalam sumber-sumber Arab dan Persia seperti karya Sulaiman al-Mahri sebagaimana dilaporkan Edward McKinnon, identifikasi Fansur dengan kawasan Ujong Pancu, Peukan Bada, Aceh Besar memperoleh dasar historiografis yang semakin kokoh. Ichwan Azhar menjelaskan bahwa kawasan Barus sejak lama memang dikenal sebagai habitat alami pohon yang menghasilkan kapur barus berkualitas tinggi. Namun, menurutnya, keberadaan komoditas tersebut tidak serta-merta menjadikan Barus sebagai pelabuhan ekspor utama. Ia berpendapat bahwa pada masa lalu kapur barus dari pedalaman Tapanuli didistribusikan ke Fansur yakni Ujong Pancu dengan kapal-kapal kecil, dari Ujong Pancu, Peukan Bada, Aceh Besar diperdagangkan ke berbagai kawasan di Asia Barat, Asia Selatan, dan Cina (Azhari, 2017).

Kesaksian masyarakat Ujong Pancu juga memperlihatkan adanya ingatan kolektif mengenai hubungan antara kawasan tersebut dengan tradisi keilmuan Islam dan jaringan perdagangan masa lalu. Seorang warga setempat menyebut bahwa di kawasan inilah Hamzah Fansuri pernah mengembangkan kegiatan intelektual dan pengajaran Islam. Menurut tradisi lisan tersebut, nisbah “Fansuri” pada nama Hamzah merujuk kepada Pancu, yakni kawasan tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan dan keilmuan. Penjelasan ini dikaitkan dengan persoalan fonetik dalam transmisi bahasa Arab, di mana bunyi “p” tidak terdapat dalam sistem fonologi Arab sehingga istilah Pancu dapat ditransliterasikan menjadi Fansur atau Fansuri. Sebagai catatan, bahasa Arab, di samping bahasa Persia dan bahasa Melayu Pasai, menjadi salah satu bahasa penting yang digunakan dalam perdagangan dan ilmu pengetahuan Alam Melayu pada masa kejayaan maritim Sumatera (Miswari,

2025). Dalam konteks ekonomi, Fansur merupakan sentra perdagangan yang menghubungkan sumber-sumber komoditas unggulan Sumatra dengan pasar internasional. Kapur Barus, rempah-rempah, hasil hutan, dan berbagai komoditas pesisir menjadi bagian dari jaringan perdagangan Samudra Hindia yang melibatkan pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, dan berbagai kawasan Alam Melayu.

Salah satu persoalan historiografis penting yang muncul dari identifikasi Barus sebagai Fansur adalah keberadaan inskripsi pada makam Mu'azzam Shah di Barus yang menyebut frasa *min balad al-Fansur* ("dari negeri Fansur"). Mustahil seseorang yang dimakamkan di Barus dikemukakan lagi di nisannya bahwa dia berasal dari Barus. Hal ini sangat menguatkan identifikasi bahwa Fansur yang dimaksud adalah Ujong Pancu. Jadi Mu'azzam Shah yang dimakamkan di Barus itu berasal dari Fansur di Aceh Besar.

Genealogi Politik Ekonomi Alam Melayu

Eksistensi penting Fansur yang berada pada posisi paling strategis pada Jalur Sutra menjadi salah satu faktor penting kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan tersebut menjadi kekuatan politik terbesar dalam sejarah kekuasaan di Alam Melayu dengan Fansur sebagai fondasi penting kemajuan ekonomi. Lokasi strategis Selat Malaka dalam sejarah telah menjadi penentu kemajuan ekonomi yang berjalan beriringan dengan kemajuan politik. Dimulai dari Jeumpa, kemudian Peureulak, dilanjutkan Pasai, kemudian Kesultanan Aceh Darussalam, menunjukkan bagaimana kemajuan pelabuhan dagang berdampak pada kemajuan politik, sekaligus kemajuan politik menyebabkan perekonomian meningkat pesat.

Sebagai negeri mula-mula terlibat langsung dalam sistem perekonomian global, kemajuan Kerajaan Jeumpa tidak dapat dipahami hanya sebagai pertumbuhan sebuah kerajaan pesisir, melainkan sebagai hasil dari keberhasilannya mengintegrasikan posisi geografis strategis, jaringan perdagangan internasional, stabilitas politik, serta kemampuan mengelola interaksi lintas budaya pada jalur maritim Selat Malaka. Sebelum kemunculan Kesultanan Peureulak dan Samudra Pasai sebagai kekuatan Islam besar di pesisir utara Sumatra, Jeumpa telah

berkembang sebagai salah satu simpul perdagangan yang menghubungkan India, Persia, Arab, dan Cina. Posisi tersebut menempatkan Jeumpa sebagai bagian dari jaringan ekonomi yang sejak abad ke-8 menjadi tulang punggung pertukaran komoditas dan gagasan di Alam Melayu.

Keunggulan utama Jeumpa terletak pada kemampuannya mengendalikan fungsi *entrepôt*, yaitu pelabuhan transit yang menyediakan keamanan, logistik, air tawar, bahan pangan, dan komoditas lokal bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi Selat Malaka. Dalam konteks ekonomi politik maritim, pelabuhan transit yang stabil memiliki nilai yang jauh lebih strategis dibandingkan kerajaan agraris yang luas. Para pedagang internasional tidak semata mencari barang dagangan, tetapi juga kepastian keamanan pelayaran, perlindungan hukum, serta kemudahan membangun jaringan perdagangan. Oleh sebab itu, stabilitas politik menjadi modal ekonomi paling penting bagi Kerajaan Jeumpa yang konon mengalami puncak kemajuan pada 777 Masehi (Nasution & Miswari, 2017).

Struktur pemerintahan Jeumpa dibangun di atas hubungan personal yang kuat antara raja, keluarga kerajaan, dan laksamana. Loyalitas elite tersebut menghasilkan pemerintahan yang relatif stabil sehingga mampu menjaga keamanan jalur perdagangan pesisir. Dalam perspektif ekonomi institusional, stabilitas politik merupakan faktor meningkatkan kepercayaan para pedagang, dan mendorong akumulasi modal perdagangan. Dengan demikian, kemajuan ekonomi Kesultanan Jeumpa bukan hanya disebabkan oleh letak geografis, tetapi terutama karena kualitas institusi politik yang berhasil menciptakan kepastian bagi aktivitas ekonomi. Di samping itu, kemajuan ekonomi Kerajaan Jeumpa juga didukung oleh kemampuan menghubungkan kawasan pedalaman dengan pelabuhan pesisir melalui jaringan sungai. Sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan menjadi koridor distribusi hasil hutan tropis, damar, kapur barus, rotan, kayu keras, hasil pertanian, rempah-rempah lokal, serta berbagai komoditas bernilai tinggi menuju pelabuhan Kuala Jeumpa. Pola seperti ini merupakan karakter umum kerajaan-kerajaan maritim awal Alam Melayu, bahwa kekuatan politik kerajaan pesisir sangat bergantung pada kemampuannya mengendalikan hubungan antara

pedalaman penghasil komoditas dengan jaringan perdagangan global (Miswari, 2023).

Setelah Kerajaan Jeumpa mengalami kemunduran, Kerajaan Peureulak tampil menjadi pelanjut pusat transaksi dan transit perdagangan pada jalur paling sibuk di dunia yakni Selat Malaka. Situasi ekonomi menjadi penentu penting kemajuan sebuah negeri. Pada masa itu, penguasa perekonomian adalah kelompok tarekat yang berasal dari Irak. Komunitas tarekat tersebut menjadi kelompok paling menguasai perdagangan dunia. Mereka memiliki armada laut yang kuat, jaringan perdagangan yang solid, serta para awak kapal yang terdiri dari anggota perguruan tarekat. Kelompok tersebut disebut Nakhoda Khalifah. Merekalah yang datang ke negeri Peureulak dan memberikan peran penting dalam transformasi kerajaan di kawasan itu menjadi Kesultanan Peureulak.

Kemajuan ekonomi politik Kesultanan Peureulak merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembentukan peradaban maritim Islam di Alam Melayu. Keberhasilan Peureulak justru dari kemampuannya mengintegrasikan perdagangan internasional, kelembagaan politik, diplomasi maritim, dan transformasi budaya dalam satu sistem kekuasaan. Islam memang memberikan legitimasi ideologis terhadap pemerintahan, tetapi pertumbuhan ekonomi dan kekuatan politik Peureulak sesungguhnya dibangun di atas posisi strategisnya dalam jaringan perdagangan Samudra Hindia yang sejak abad kesembilan. Secara geografis, Peureulak berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Jalur ini merupakan koridor perdagangan tersibuk di Asia sebelum munculnya dominasi kolonial Eropa. Kapal-kapal dari Basrah, Gujarat, Coromandel, Sri Lanka, hingga Guangzhou menjadikan pesisir utara Sumatra sebagai titik persinggahan untuk memperoleh air tawar, bahan makanan, kayu, kapur barus, rempah-rempah, serta berbagai komoditas tropis lainnya. Posisi tersebut menjadikan Peureulak berkembang sebagai negeri pelabuhan yang memperoleh kekayaan melalui kemampuan mengendalikan arus perdagangan internasional.

Kemajuan ekonomi Kesultanan Peureulak tidak hanya bersumber dari aktivitas perdagangan, tetapi juga dari kemampuannya menghubungkan kawasan

pedalaman Sungai-sungai menjadi jalur distribusi berbagai hasil bumi menuju pelabuhan. Komoditas diangkut dari pedalaman menuju bandar Peureulak untuk kemudian diperdagangkan kepada saudagar Arab, Persia, India, maupun Cina. Peureulak memperoleh pengakuan simbolik dari komunitas pedagang Muslim internasional sehingga meningkatkan kepercayaan para saudagar asing untuk menjadikan pelabuhan tersebut sebagai basis aktivitas ekonomi.

Keberhasilan Peureulak juga didukung oleh diplomasi internasional yang sangat efektif. Hubungan pernikahan antara keluarga kerajaan dengan tokoh-tokoh keturunan Persia dan Arab merupakan strategi politik untuk memperluas jaringan ekonomi internasional. Para pedagang membawa pengetahuan navigasi, administrasi perdagangan, teknologi pelayaran, sistem kontrak dagang, hingga tradisi intelektual Islam yang memperkuat kapasitas ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan. Islamisasi Peureulak berlangsung melalui mekanisme integrasi ekonomi sebelum berkembang menjadi transformasi politik dan budaya. Kemajuan politik Peureulak juga ditopang oleh kemampuan membangun keseimbangan antara otoritas negara dan otoritas intelektual. Zawiyah Cot Kala berkembang menjadi pusat pendidikan yang berkontribusi bagi peningkatan ekonomi, kekuatan politik, dan ilmu pengetahuan. Zawiyah Cot Kala bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan pusat produksi pengetahuan yang memperkuat legitimasi politik kesultanan (Miswari, 2024a).

Kemajuan Kesultanan Peureulak tidak berlangsung tanpa dinamika internal. Namun Kesultanan Peureulak mampu mempertahankan jaringan perdagangan sehingga ekonominya jauh lebih stabil, mengatasi dinamika elite politik. Kemajuan ekonomi Kesultanan Peureulak sangat dipengaruhi oleh jasa perdagangan, pelayaran, logistik, serta pengendalian pelabuhan. Keamanan laut menjadi investasi politik yang sangat penting guna memastikan bahwa kapal-kapal dagang terlindungi dari ancaman bajak laut, memperoleh fasilitas pelabuhan yang memadai, serta mendapatkan kepastian transaksi.

Kesultanan Peureulak bertahan ratusan tahun hingga disatukan dengan Pasai dan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malikus Saleh.

Dia merupakan keturunan Dinasti Aziziyah yang telah lama tersingkir dari Kesultanan Peureulak dan menguasai negeri Samudra melalui pernikahan dengan putri penguasa negeri tersebut. Sebelum Samudra Pasai berdiri, perekonomian di pasai berlangsung stabil meskipun tidak dalam skala besar. Kekuasaan ekonomi masih dipegang oleh Kesultanan Peureulak. Namun negeri-negeri di Pasai dapat terus menerus menghasilkan komoditas yang dibutuhkan oleh jaringan perdagangan internasional. Salah satu penguasa terbesar di Pasai waktu itu adalah Maharaja Bakoy. Gelar maharaja menunjukkan bahwa dia menguasai beberapa negeri yang disebut tanah di Pasai. Kekuasaan Maharaja Bakoy mendapatkan tantangan dari negeri yang kemudian menjadi pusat kesultanan Samudra Pasai, yang mana masa itu telah berkembang menjadi salah satu pelabuhan yang dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri yang jauh. Pihak aliansi dagang dari Hijaz melihat peluang penguasaan Pasai dan berusaha mendirikan sebuah sistem kekuasaan politik melalui seorang pemuda petualang keturunan bangsawan yang memiliki garis keturunan hingga Sayyidina Hussain (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2011). Dinobatkanlah Meurah Silu sebagai sultan dengan gelar Malikus Saleh. Tantangan internal utama yang harus diselesaikan Pasai adalah menekan dominasi pihak Maharaja Bakoy. Dengan dukungan Syarif Makkah, sebuah aliansi dagang sekaligus kelompok misi agama dari Hijaz yang merupakan salah satu kekuasaan besar dalam transaksi perdagangan waktu itu menjadikan Pasai dapat dengan mudah melaksanakan misi-misinya bahkan berhasil menguasai negeri Samudra yang telah ratusan tahun berdiri sebagai sebuah kesultanan yang tangguh bernama Kesultanan Peureulak.

Kemajuan ekonomi politik Kesultanan Samudra Pasai merupakan salah satu transformasi paling penting dalam sejarah Alam Melayu maritim yang memiliki kapasitas ekonomi, birokrasi, dan diplomasi jauh lebih matang. Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat intelektual Islam terbesar di Alam Melayu. Kemajuan tersebut tidak hanya didorong oleh letak geografis yang strategis di pesisir utara Sumatra, tetapi juga oleh keberhasilan mengintegrasikan perdagangan global, administrasi pemerintahan,

jaringan ulama, dan legitimasi keagamaan ke dalam satu sistem ekonomi politik yang efektif. Samudra Pasai menjadikan perdagangan internasional sebagai fondasi utama legitimasi politik dan pembangunan sosial.

Posisi geografis Samudra Pasai di jalur utama Selat Malaka menjadi koridor perdagangan paling strategis yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Jalur ini bukan hanya mempertemukan berbagai komoditas, tetapi juga mempertemukan berbagai tradisi intelektual, sistem hukum, teknologi pelayaran, dan kebudayaan. Samudra Pasai mampu memanfaatkan dinamika tersebut dengan mengembangkan bandar yang aman, terbuka, dan memiliki kepastian hukum bagi para saudagar internasional. Kemajuan perdagangan Samudra Pasai ditopang oleh kemampuan menghubungkan kawasan pedalaman Sumatra dengan pasar internasional. Sungai-sungai besar menjadi jalur distribusi berbagai komoditas bernilai tinggi seperti emas, lada, kapur barus, damar, rotan, kayu keras, hasil hutan, serta berbagai produk agraris menuju pelabuhan. Selanjutnya komoditas tersebut diperdagangkan kepada saudagar Arab, Persia, Gujarat, Benggala, Cina, maupun berbagai negeri di Alam Melayu. Penguasaan atas jalur sungai, pelabuhan, dan distribusi barang memberikan banyak sumber pendapatan bagi Samudra Pasai. Sistem ini menciptakan surplus ekonomi yang kemudian digunakan untuk memperkuat birokrasi, militer, pendidikan, dan diplomasi.

Keunggulan ekonomi Samudra Pasai mendorong lahirnya sistem administrasi pemerintahan yang lebih terorganisasi dibandingkan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Samudra Pasai mulai mengembangkan birokrasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya regulasi, administrasi, dan pengawasan masyarakat. Kesultanan memahami bahwa perdagangan internasional memerlukan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang tertib. Oleh karena itu, berbagai fungsi administrasi mulai dilembagakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pedagang dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Miswari, 2022). Kemajuan politik Samudra Pasai juga ditopang oleh kemampuan membangun legitimasi agama. Samudra Pasai berhasil menjadikan Islam sebagai identitas resmi sekaligus instrumen diplomasi

internasional. Penggunaan bahasa Melayu yang ditulis dengan aksara Arab (Jawi), penerapan mata uang emas (*dirham*), penggunaan gelar-gelar Islam dalam pemerintahan, serta hubungan erat dengan pusat-pusat keilmuan Islam menjadikan Samudra Pasai memperoleh pengakuan luas di dunia Islam (Miswari, 2025).

Salah satu keunggulan utama Samudra Pasai adalah keberhasilannya mengembangkan pendidikan. Zawiyah Blang Peuria berkembang menjadi pusat intelektual Islam yang melahirkan ulama, ahli tasawuf, serta cendekiawan yang berpengaruh hingga ke berbagai wilayah Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Abdurrauf al-Singkili, dan sejumlah tokoh besar lainnya berada dalam mata rantai tradisi intelektual yang berkembang dari Samudra Pasai. Kemajuan ekonomi dan pendidikan tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di India, Timur Tengah, Cina, dan kemudian dengan Malaka. Hubungan ini tidak hanya berlangsung melalui aktivitas perdagangan, tetapi juga melalui migrasi ulama, perkawinan politik, serta pertukaran intelektual. Putri-putri Pasai dinikahkan dengan keluarga penguasa di Malaka, Majapahit, dan kawasan lainnya. Sementara para bangsawan Pasai berhijrah ke Jawa, Kalimantan, dan wilayah lain setelah mengalami dinamika politik internal. Migrasi elite tersebut justru memperluas pengaruh politik dan intelektual Pasai di berbagai kawasan Nusantara.

Kemajuan Samudra Pasai mulai mengalami tantangan ketika muncul Kesultanan Malaka sebagai pesaing baru dalam perdagangan internasional. Sikap terbuka Samudra Pasai terhadap perkembangan Malaka justru memberikan ruang bagi pelabuhan tersebut untuk berkembang menjadi pusat perdagangan baru. Banyak saudagar dari Persia, Arab, India, Afrika Utara, dan Cina secara bertahap memindahkan aktivitas perdagangan mereka ke Malaka karena menawarkan posisi geografis yang lebih menguntungkan dan dukungan politik yang semakin kuat. Pergeseran tersebut menyebabkan pendapatan ekonomi Pasai mulai menurun. Meski demikian, warisan penting Samudra Pasai bagi negeri-negeri Melayu setelahnya adalah penetapan regulasi administratif yang dimulai dari sistem perekonomian yang berkembang pada dimensi perpolitikan menjadikan kesultanan

tersebut dan negeri-negeri setelahnya memiliki sistem birokrasi yang tertata dan pasti sebagaimana diwarisi oleh Kesultanan Malaka dan Aceh Darussalam.

Setelah mengalami serangan Majapahit, Samudra Pasai berkembang menjadi kesultanan independen yang lebih maju, khususnya dalam peningkatan potensi komoditas di pedalaman dan rumusan regulasi perekonomian dan politik. Selanjutnya pasca Sultanah Nahrashah, kemunduran Samudra Pasai terjadi secara bertahap antara lain akibat serangan Portugis secara terus-menerus. Akhirnya, Samudra Pasai dijadikan bagian Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat Syah. Pada masa itu, banyak intelektual Pasai termasuk Hamzah Fansuri berhijrah dan mengembangkan karir intelektualnya di pusat kekuasaan Aceh Darussalam.

Oligarki sebagai Penentu Kekuatan Ekonomi Aceh Darussalam

Perkembangan Kesultanan Aceh Darussalam tidak dapat dijelaskan hanya melalui paradigma sistem monarki yang menempatkan sultan sebagai pusat tunggal kekuasaan. Dari perspektif ekonomi politik, keberhasilan tersebut sesungguhnya bertumpu pada keberadaan Orang Kaya, yakni koalisi elite dagang yang mengintegrasikan modal perdagangan, birokrasi pelabuhan, diplomasi internasional, dan kekuasaan politik dalam satu sistem yang saling bergantung. Sistem tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak didirikannya Kesultanan Peureulak oleh Nakhoda Khalifan dan dilanjutkan Syarif Makkah di Samudra Pasai.

Negeri0negeri maritim Alam Melayu tidak hanya dikendalikan oleh otoritas istana, tetapi juga oleh kelompok pedagang besar (Orang Kaya) yang menguasai sirkulasi modal, pelabuhan, logistik, perpajakan, dan jaringan perdagangan internasional. Denys Lombard menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Aceh merupakan hasil interaksi antara istana, ulama, dan komunitas dagang yang menjadikan pelabuhan sebagai pusat akumulasi kekayaan sekaligus arena negosiasi politik (Lombard, 2014). Anthony Reid juga menegaskan bahwa kekuatan Aceh Darussalam berasal dari kemampuannya mengendalikan perdagangan internasional melalui jaringan para saudagar yang terhubung dengan Gujarat, Arab,

Persia, Turki Utsmani, Coromandel, hingga Laut Merah (Reid, 2005). Elite dagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi juga aktor politik yang menentukan arah pemerintahan. Negeri-negeri pelabuhan Alam Melayu memperoleh legitimasi politik melalui keberhasilan mengendalikan perdagangan maritim. Dalam kerangka tersebut, ekonomi politik Aceh Darussalam menunjukkan hubungan antara perdagangan global, akumulasi modal, dan distribusi kekuasaan.

Perdagangan global menjadi sumber utama akumulasi modal yang kemudian terkonsentrasi pada kelompok oligarki yang dalam bahasa Melayu disebut Orang Kaya sebagai elite ekonomi. Modal tersebut tidak berhenti sebagai kekayaan pribadi, tetapi dikonversi menjadi patronase politik melalui pembiayaan birokrasi, armada laut, diplomasi, dan pergantian elite pemerintahan. Sultan memperoleh legitimasi politik melalui dukungan kelompok tersebut, sementara negara memberikan regulasi, perlindungan militer, dan monopoli perdagangan yang kembali meningkatkan keuntungan para pedagang. Dengan demikian, hubungan antara sultan dan oligarki membentuk suatu siklus resiprokal yang menjadi fondasi kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam.

Setelah Portugis menguasai Malaka pada 1511, arus perdagangan Muslim mengalami reorientasi menuju pelabuhan-pelabuhan alternatif di pesisir Sumatra, terutama Aceh Darussalam yang berpusat di Fansur. Perubahan geopolitik ini menciptakan peluang luar biasa bagi Aceh Darussalam untuk berkembang sebagai pusat distribusi lada, timah, emas, kapur barus, sutra, tekstil India, kuda Arab, serta berbagai komoditas dari Timur Tengah dan Asia Timur. Saudagar dari Gujarat, Coromandel, Hadramaut, Persia, Turki Utsmani, bahkan Inggris dan Belanda mulai menjadikan Fansur sebagai pelabuhan utama. Arus perdagangan berskala internasional tersebut menghasilkan akumulasi modal yang sangat besar sehingga memungkinkan munculnya kelompok elite perdagangan dengan kapasitas finansial yang melimpah. Kelompok inilah yang dalam sumber-sumber Portugis maupun sumber Aceh dikenal sebagai Orang Kaya. Istilah tersebut tidak dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai "orang yang memiliki banyak harta". Dalam struktur politik Aceh, Orang Kaya adalah istilah dalam bahasa Melayu yang

berarti elite ekonomi, elite fiskal, elite pelabuhan, elite diplomasi, sekaligus elite politik. Mereka menguasai perdagangan ekspor-impor, memiliki armada kapal sendiri, mengendalikan gudang penyimpanan komoditas, pengendali pajak pelabuhan, dan menjalin hubungan langsung dengan saudagar asing. Kekayaan mereka tidak hanya berasal dari aktivitas niaga, tetapi juga dari akses terhadap kebijakan negara yang memberikan hak monopoli atas komoditas tertentu.

Orang Kaya memiliki fungsi fiskal yang sangat menentukan keberlangsungan suatu negeri. Dalam berbagai catatan Portugis, Belanda, dan Inggris, elite dagang Aceh Darussalam berperan aktif membiayai pembangunan kapal perang, menyediakan persenjataan, memenuhi logistik militer, dan membayar awak armada. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan perang Aceh Darussalam melawan Portugis tidak sepenuhnya bergantung pada kesultanan. Sebaliknya, perang menjadi proyek bersama antara kesultanan dan komunitas dagang karena keamanan Selat Malaka secara langsung menentukan keberlangsungan perdagangan mereka. Oleh sebab itu, keberhasilan Aceh Darussalam dalam mempertahankan tekanan militer terhadap Portugis selama beberapa abad merupakan hasil kolaborasi antara kekuasaan politik dan modal perdagangan.

Peran Orang Kaya juga tampak dalam proses reproduksi kekuasaan politik. Berbagai sumber menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam penobatan maupun pemberhentian sultan. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani, misalnya, dukungan para Orang Kaya menjadi faktor penting dalam pengangkatan Sultanah Safiatuddin. Hal ini menunjukkan legitimasi politik Aceh tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan dinasti, tetapi juga oleh konsensus elite dagang yang menguasai sumber daya ekonomi. Demikian juga antara pasca kekuasaan Sultan Alauddin Ri'ayat Syah dan Sultan Iskandar Muda, beberapa sultan berganti dengan begitu cepat. Masa itu adalah dominasi paling kuat oleh para oligarki. Sebagaimana digambarkan Lombard, mereka dapat dengan mudah mengangkat dan menurunkan sultan sesuai kehendak. Bila ada sultan yang tidak dapat mengikuti kehendak mereka, maka segera dilenyapkan dan diganti dengan siapa yang bersedia mengikuti kehendak para Orang Kaya itu (Lombard, 2014).

Sepanjang sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, sebagaimana masa awal Kesultanan Peureulak dan Samudra Pasai—kecuali beberapa sultan yang kuat antara lain seperti Ali Mughayat Syah, Alauddin Riayat Syah al-Qahhar, Iskandar Muda—kekuasaan politik secara *de facto* sebenarnya berada di tangan oligarki itu.

Realitas menunjukkan bahwa sebenarnya sultan juga membutuhkan dukungan Orang Kaya untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan. Mereka punya kekuatan besar dalam mengatur situasi perdagangan dan punya pengaruh kuat dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Sebagai imbalannya, negara mengeluarkan berbagai regulasi yang melindungi kepentingan perdagangan. Monopoli komoditas, pengaturan harga ekspor, pengawasan pelabuhan, pengendalian kapal asing, hingga sistem perpajakan merupakan instrumen yang memastikan keuntungan tetap berada dalam jaringan ekonomi Aceh. Anthony Reid menjelaskan bahwa monopoli perdagangan bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan mekanisme politik untuk mengendalikan distribusi kekayaan sekaligus memperkuat loyalitas elite dagang kepada kesultanan (Lombard, 2014). Regulasi tersebut menciptakan siklus akumulasi modal yang semakin memperkuat para oligarki. Semakin besar perdagangan internasional, semakin besar keuntungan yang diperoleh Orang Kaya. Kekayaan tersebut kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk armada kapal, gudang perdagangan, kredit kepada pedagang asing, dan pembiayaan ekspedisi dagang. Sebagian modal dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek politik sultan, termasuk pembangunan benteng, sarana ibadah, dan lembaga pendidikan.

Keberadaan oligarki juga menjelaskan mengapa Aceh Darussalam mampu berkembang menjadi pusat intelektual Islam terbesar di Alam Melayu. Kekayaan perdagangan memungkinkan pembiayaan terhadap jaringan ulama internasional yang datang dari Hijaz, Persia, dan India (Miswari, 2024c). Tokoh-tokoh intelektual Alam Melayu yang nama-nama mereka menjadi legenda, berkembang dalam lingkungan yang didukung oleh surplus ekonomi perdagangan. Pendanaan terhadap pendidikan, penyalinan manuskrip, pembangunan masjid, serta ragam aktivitas intelektual tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi yang dihasilkan oleh

perdagangan internasional. Dalam perspektif ekonomi politik, produksi ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk investasi penting. Khususnya pada masa kekuasaan sultan-sultan yang kuat, hubungan antara sultan dan merchant oligarchy alias Orang Kaya tidak selalu harmonis.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, kesultanan berupaya memperkuat sentralisasi kekuasaan dengan membatasi otonomi elite dagang melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap monopoli perdagangan. Sultan Iskandar Muda mengonsolidasikan kekuasaan di bawah otoritas istana. Melalui reformasi birokrasi, pengawasan pelabuhan, pembatasan otonomi uleebalang, dan sentralisasi monopoli perdagangan, sultan memperkuat kapasitas fiskal dan militer istana. Kebijakan tersebut berhasil memperbesar kapasitas kesultanan sehingga mampu menekan ruang manuver merchant oligarchy. Namun, sentralisasi tersebut tidak berlangsung permanen. Setelah wafatnya Iskandar Muda, keseimbangan lama kembali mengemuka. Orang Kaya kembali tampil sebagai aktor politik utama yang, melalui kontrol atas perdagangan, pembiayaan, dan jaringan patronase, memiliki kapasitas besar untuk menopang, memengaruhi, bahkan melemahkan otoritas sultan dalam dinamika politik Kesultanan Aceh. Sehingga para Orang Kaya memperoleh pengaruh politik yang semakin besar, terutama pada masa pemerintahan para sultanah (1641–1699). Pada masa sultanah dan beberapa sultan setelahnya, keputusan-keputusan penting negara semakin bergantung pada konsensus elite dagang, uleebalang, dan ulama.

Dalam hal ini, sepanjang sejarah kesultanan, kekuasaan politik Aceh Darussalam secara *de facto* dibatasi oleh keberadaan elite ekonomi yang menguasai sumber daya fiskal dan jaringan perdagangan internasional. Kesultanan berfungsi sebagai regulator, pelindung, dan distributor hak-hak monopoli, sedangkan kalangan oligarki menyediakan modal, logistik, jaringan perdagangan, dan dukungan politik. Hubungan yang saling bergantung ini memungkinkan Aceh Darussalam bertahan sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di Nusantara. Kemajuan ekonomi politik dibangun melalui siklus yang menghubungkan perdagangan internasional dengan distribusi kekuasaan domestik. Dalam kerangka

ini, Orang Kaya menjadi aktor sentral dalam pembentukan kekuasaan politik, pembiayaan perang, pengelolaan pelabuhan, diplomasi internasional, dan reproduksi kekuasaan politik. Sebab itulah, ketika kekuatan oligarki itu melemah, kesultanan mengalami kemerosotan wibawa, melemahnya daya tawar diplomasi, dan merosotnya kekuatan militer. Faktor ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Kolonial Belanda untuk melancarkan serangan pada 1873.

Fansur sebagai Ruang Kosmopolitan: Memahami Kembali Latar Intelektual Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai seorang penyair sufi atau tokoh tasawuf yang menghasilkan karya-karya bercorak metafisik. Pembacaan demikian cenderung melepaskan pemikirannya dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk horizon intelektualnya. Sebaliknya, Hamzah Fansuri perlu ditempatkan dalam lanskap maritim Alam Melayu, yaitu sebuah ruang kosmopolitan yang mempertemukan perdagangan internasional, diplomasi antarnegara, mobilitas ulama, pertukaran gagasan, dan kompetisi politik (Miswari, 2024b). Dalam perspektif ini, Hamzah Fansuri merupakan seorang intelektual yang karirnya berkembang di lingkungan kota pelabuhan kosmopolitan. Identitas tersebut menjelaskan keluasan wawasan intelektualnya sekaligus memberikan konteks historis terhadap karya-karyanya yang memperlihatkan penguasaan atas tradisi Islam, Persia, Arab, dan Melayu secara bersamaan.

Apabila identifikasi Fansur dengan kawasan Ujong Pancu di Peukan Bada pesisir Aceh Besar diterima sebagai hipotesis yang paling konsisten dengan bukti arkeologis, epigrafis, dan geografis yang tersedia, lingkungan sosial Hamzah Fansuri merupakan salah satu kawasan paling kosmopolitan di Alam Melayu pada abad keenam belas. Kawasan ini bukan sekadar pelabuhan tempat keluar masuk komoditas, tetapi juga ruang pertemuan berbagai komunitas internasional. Saudagar Arab, Persia, Gujarat, Bengal, Tamil, Melayu, Cina, hingga kepulauan

Nusantara berinteraksi secara intensif melalui perdagangan, perkawinan, diplomasi, dan dialog ilmu pengetahuan.

Fansur menjadi ruang yang sangat dinamis, tempat bertemunya para pedagang, ulama, diplomat, pelaut, penerjemah, penulis, dan pejabat istana. Dalam konteks demikian, pengetahuan berkembang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan politik. Latar belakang tersebut menjelaskan mengapa karya-karya Hamzah memperlihatkan penguasaan yang luas terhadap tradisi intelektual Islam.. Perspektif ini juga membantu menjelaskan mengapa pemikiran politik Hamzah Fansuri tidak hanya membahas perjalanan spiritual individu menuju Tuhan, tetapi juga menyinggung konsep raja, keadilan, kekuasaan, dan tanggung jawab moral penguasa (Hadi, 2001). Tema-tema tersebut tidak muncul sebagai metafora yang terpisah dari realitas sosial, melainkan sebagai refleksi seorang intelektual yang hidup di lingkungan yang tidak jauh dari pusat kekuasaan Aceh Darussalam yakni Fansur.

Hamzah Fansuri mengembangkan karir intelektualnya pada masa ketika pelabuhan Fansur menjadi simpul utama perdagangan Nusantara. Situasi sosial tersebut menjelaskan mengapa Hamzah Fansuri mampu mengintegrasikan pengalaman spiritual dengan wawasan politik, perdagangan, diplomasi, dan kebudayaan lintas kawasan. Ia bukan seorang sufi yang mengasingkan diri dari kehidupan dunia, melainkan seorang intelektual yang hidup di tengah denyut ekonomi maritim Alam Melayu, menyaksikan perjumpaan berbagai peradaban, serta menerjemahkan pengalaman kosmopolitan tersebut ke dalam karya-karya yang kemudian membentuk tradisi intelektual Islam Alam Melayu.

Hamzah Nin asalnya Fansuri

Mendapat wujud di Tanah Syahr Nawi

Hamzah Fansuri dalam puisinya mengatakan bahwa ia lahir di tanah Syahri Nuwi yang mana nama tersebut dapat dinisbahkan kepada kawasan yang berada di bawah Kesultanan Peureulak. Penyebutan istilah sebuah negeri dengan *tanah* adalah ciri khas Samudra-Pasai, sebagaimana di Aceh Besar penyebutan itu menggunakan istilah *alam* atau dalam bahasa Aceh sekarang disebut *lam*. Setelah

menimba ilmu di kawasan Samudra, Hamzah Fansuri memperdalam ilmunya di Zawiyah Blang Peuria yang terletak tidak jauh dari pusat kekuasaan Samudra Pasai. Zawiyah itu telah melahirkan banyak intelektual termasuk beberapa Wali Songo yang mengembangkan karier intelektualnya di Pulau Jawa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Syaikh Siti Jenar juga merupakan alumni zawiyah itu, mengingat ia mengembangkan ajaran tasawuf yang sama sekali terbedakan dengan ajaran tasawuf yang berkembang di Timur Tengah, sementara pada masa itu, Zawiyah Blang Peuria merupakan pusat pendidikan di Nusantara yang menekankan pada pengembangan tasawuf filosofis (Miswari, 2022, 2024c).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Kesultanan Peureulak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam tidak dapat dipahami semata-mata melalui perspektif islamisasi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka ekonomi politik maritim yang mengintegrasikan perdagangan internasional, institusi politik, pendidikan, diplomasi, dan otoritas keagamaan. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa identifikasi Fansur dengan kawasan Ujong Pancu di Peukan Bada memiliki konsistensi yang lebih kuat dengan bukti arkeologis, epigrafis, geografis, dan dinamika perdagangan Samudra Hindia dibandingkan identifikasinya dengan Barus. Dalam konteks tersebut, Hamzah Fansuri dipahami sebagai intelektual yang berkembang di lingkungan kota pelabuhan kosmopolitan, sehingga keluasan pemikiran tasawuf, politik, dan kebudayaannya merupakan refleksi dari interaksi intensif dengan jaringan perdagangan dan intelektual dunia Islam. Penelitian selanjutnya perlu memperkuat argumentasi ini melalui kajian multidisipliner yang mengintegrasikan arkeologi maritim, epigrafi, filologi, sejarah lingkungan, dan analisis jaringan perdagangan untuk merekonstruksi posisi Fansur secara lebih komprehensif dalam historiografi Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1967). New Light on the Life of Hamzah Fansuri. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 40(1), 42–51.
- Al-Attas, S. M. N. (1970). *The Mysticism of Hamzah Fansuri*. University of Malaya Press.
- Azhari, I. (2017). “POLITIK HISTORIOGRAFI” SEJARAH LOKAL: KISAH KEMENYAN DAN KAPUR DARI BARUS, SUMATERA UTARA. *Sejarah Budaya*, 11(1).
- Azhari, I. (2019). *Seminar Internasional Titik Nol Islam Nusantara* (4).
- Braginsky, V. (1999). Towards the Biography of Hamzah Fansuri. When Did Hamzah Live? Data From His Poems and Early European Accounts. *Archipel*. <https://doi.org/10.3406/arch.1999.3521>
- Drewes, G. W. J., & Brakel, L. F. (1986). *The Poems of Hamzah Fansûrî*. Forish Publication Holland.
- Guillot, C., & Kalus, L. (2000). La stèle funéraire de Hamzah Fansuri. *Archipel*, 60(4), 3–24. <https://doi.org/10.3406/arch.2000.3577>
- Guillot, C., & Kalus, L. (2008). *Enskripsi Islam Tertua di Indonesia*. Gramedia.
- Guillot, C. (2008). *Barus: Seribu Tahun yang Lalu*. KPG.
- Hadi, A. W. . (2001). *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya Hamzah Fansuri*. Paramadina.
- John, A. H. (1990). The Poems of Hamzah Fansuri. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 146(2), 325–331. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003221>
- Lombard, D. (2014). *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Gramedia.
- Miswari. (2022). Kesultanan Samudra Pasai dan Strateginya Dalam Islamisasi Nusantara. *Liwaul Dakwah*, 12(1), 40–60.
- Miswari. (2023). Kerajaan Jeumpa dan Penyerapan Agama ke dalam Nilai Budaya. *Liwaul Dakwah*, 13(1), 10. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2032>
- Miswari, M. (2024a). Dialektika Agama dan Budaya dalam Sejarah Kesultanan Peureulak: Analisis Konflik Dinasti Aziziyah dan Dinasti Meurah. *Liwaul Dakwah*, 14(1), 55–94. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i1.2031>
- Miswari, M. (2024b). Kosmopolitanisme Kesultanan Aceh Darussalam: Pusat Perekonomian, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan. *Liwaul Dakwah*, 14(2).
- Miswari, M. (2024c). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Aceh Dari Periode Klasik Hingga Modern. *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 48–71. <https://doi.org/10.59166/edumulya.v2i1.193>
- Miswari, M. (2025). PERAN BAHASA MELAYU PASAI DALAM PENYEBARAN BAHASA PERSATUAN NASIONAL MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *SYAIKHONA: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 53–74. <https://doi.org/10.59166/syaikhona.v3i2.368>
- Nasution, I. F. A., & Miswari. (2017). Rekonstruksi Identitas Konflik Kesultanan Peureulak. *Paramita*, 27(2), 168–181. <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11159>
- Reid, A. (2005). *Asal Mula Konflik Aceh*. Obor.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2011). *Historical Fact and Fiction*. UTM.
Tumanggor, R. (2019). *Seminar Internasional Titik Nol Islam Nusantara*.